



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Oktober 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KARYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG IZIN NON USAHA**
3. NHK : **663405**

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 508.500.000**
1. Tanah Seluas 1313 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 52.000.000
 2. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 19.000.000
 3. Tanah Seluas 773 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
 4. Tanah Seluas 676 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 25.500.000
 5. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/253 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
 6. Tanah Seluas 671 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
 7. Tanah Seluas 924 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 119.500.000**
1. MOTOR, VARIO NC12A1CF A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
 2. MOTOR, LEXI - Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
 3. MOBIL, TERIOS TX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 5.450.000**
- D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**
- E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 13.205.038**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 646.655.038

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 646.655.038

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.